

# KEBERPIHAKAN PROGRAM BUMI SEJUTA SAPI PEMERINTAH PROVINSI NTB TERHADAP PETERNAK SAPI

Zulkarnaen  
(Dosen STIE AMM Mataram)  
Email: zulkarnaen\_amm@yahoo.co.id

## Abstract

West Nusa Tenggara province is one of Caou produsen which has land for grows of cao are lagers enough. The capacity of cao are two millions per a year. Which is ued just 34.79 percent. So that the government of West Nusa Tenggara provence want to make meat production trought BSS. There are two things are very good potencials are making famerdoing difficult is: Control of cutting cows, from 20% to 5% in 2018; shipping restrictions cows outside the region of 13,000 head into 8.500 tail. This can result in a weak bargaining position of farmers become. Objective: to know the model applied marketing NTB provincial government after the BSS program; determine the economic impact of changes in income breeders seen breeder after BSS program. This study used a qualitative approach with descriptive exploratory method. Research conducted on 12 groups of farmers in the district of Praya Timur. The analysis model is the analysis Miles Huberman. Result: The model of post-program BSS livestock marketing is no different from previous models in which farmers are free to market their animals to the buyer with the provisions of the beneficiaries of the program BSS livestock, livestock sales else is to be done after the birth of at least two. Economic impact farmers/breeders seen from the movement of revenues, it turns BSS program can have a positive impact (intended impact) to farmers.

Keywords: *Bumi Sejuta Sapi, Movement of revenue, marketing model*

## A. Pendahuluan

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu produsen sapi di Indonesia yang memiliki potensi lahan pengembangan sapi cukup luas. Berdasarkan perhitungan ketersediaan pakan, NTB memiliki potensi kapasitas tampung ternak 2 juta ekor pertahun, di mana yang dimanfaatkan baru sekitar 34,79 persen. Luas lahan potensial untuk pakan ternak terbagi di dua pulau yakni Pulau Lombok sebesar 386.478 hektar yang bisa memenuhi kebutuhan pakan ternak sebanyak 800 ribu ekor, sementara lahan di Pulau Sumbawa yang potensial untuk sumber pakan

mencapai 1,3 juta hektar yang diperkirakan bisa untuk memenuhi kebutuhan pakan 1,2 juta ekor.

Dalam rangka mengokohkan NTB sebagai produsen sapi sekaligus mendukung percepatan program swasembada daging sapi, Pemerintah Provinsi NTB sejak 17 Desember 2008 telah melaksanakan sebuah program akselerasi pengembangan ternak sapi yaitu Program Bumi Sejuta Sapi (BSS).

Melalui program BSS diupayakan peningkatan populasi, produksi, dan produktivitas sapi dengan menetapkan empat kebijakan pokok, yaitu:

1. 3S (Satu induk–Satu anak–Satu tahun), bertujuan untuk mengoptimalkan produktivitas induk sapi, sehingga meningkatkan jumlah kelahiran pedet;
2. Pengendalian penjualan sapi bibit betina, berupa pembatasan pengiriman ke luar daerah sapi bibit betina selama tiga tahun pertama program NTB BSS (2009-2011), yang semula sekitar 13.000 ekor menjadi 8.500 ekor per tahun. Dengan pembatasan pengeluaran sapi bibit betina selama periode tertentu maka jumlah induk pada periode berikutnya akan meningkat;
3. Pengendalian pemotongan betina produktif: kebijakan ini berupa upaya pengurangan persentase pemotongan betina produktif terhadap jumlah pemotongan tercatat, dari 20% pada Tahun 2009 menjadi 10% pada Tahun 2013 dan 5% pada Tahun 2018. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan jumlah induk produktif;
4. Pengendalian penyakit pedet: kebijakan ini berupa upaya pengurangan jumlah kematian pedet yang diakibatkan oleh parasit dengan memberikan obat cacing gratis untuk pedet umur 1 sampai 6 bulan. Kebijakan ini penting karena hampir 70% kematian pedet diakibatkan oleh parasit. (Blue Print NTB BSS, 2009)

Dalam mensukseskan program BSS itu, Pemerintah Provinsi NTB telah mengeluarkan sejumlah regulasi antara lain membatasi tata niaga ternak antar pulau, pengendalian pemotongan sapi betina produktif dan pembibitan sapi berbasis masyarakat. Regulasi tersebut dikeluarkan dalam bentuk peraturan Gubernur NTB. Selain itu, sejak 2009 telah disalurkan dana program pemberdayaan masyarakat kepada 252 kelompok peternak dengan nilai Rp.30,308 miliar, yang dimanfaatkan peternak untuk pengadaan ternak sapi sebanyak 4.351 ekor.

Pembatasan pengiriman ternak sapi bibit betina ke luar daerah dan kebijakan untuk mengurangi persentase pemotongan betina produktif berdampak langsung pada pendapatan/pemenuhan kebutuhan hidup peternak dimana larangan menjual sapi ke luar daerah dapat menyebabkan penjualan hanya terjadi antara peternak dengan pembeli lokal. Hal tersebut dapat menyebabkan *bergaining position*

peternak menjadi lemah. Kondisi demikian berpotensi merugikan peternak karena pendapatan dari penjualan ternak menjadi rendah. Demikian juga dengan pembatasan pemotongan sapi betina perlu mendapat kajian ekonomi lebih mendalam karena dapat menimbulkan permasalahan baru yaitu kesulitan ekonomi bagi peternak yang sumber penghasilannya hanya dari beternak.

Sistem pemasaran hasil ternak dari program Bumi Sejuta Sapi, hingga saat ini belum jelas keberpihakannya. Walaupun kebijakan BSS bertujuan untuk meningkatkan populasi sapi di NTB, akan tetapi di sisi lain pembatasan penjualan dan pemotongan sangat mungkin dapat merugikan peternak terutama peternak yang tidak mendapat bantuan dari program BSS. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka pemerintah provinsi NTB perlu menentukan model pemasaran yang dapat mengeliminir potensi kerugian yang mungkin ditanggung peternak akibat program BSS.

## **B. Kajian Literatur**

### **1. Kebijakan Bumi Sejuta Sapi**

Kebijakan Bumi Sejuta Sapi merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah NTB dalam upaya peningkatan populasi, produksi, dan produktivitas sapi di wilayah NTB. Untuk itu ditetapkan empat kebijakan pokok, yaitu:

1. 3S (Satu induk–Satu anak–Satu tahun). Tujuan kebijakan ini untuk mengoptimal-kan produktivitas induk sapi, sehingga meningkatkan jumlah kelahiran pedet;
2. Pengendalian pengeluaran sapi bibit betina: kebijakan ini berupa pembatasan pengeluaran sapi bibit betina;
3. Pengendalian pemotongan betina produktif : kebijakan ini berupa upaya pengurangan persentase pemotongan betina produktif terhadap jumlah pemotongan;
4. Pengendalian penyakit pedet: kebijakan ini berupa upaya pengurangan jumlah kematian pedet yang diakibatkan oleh parasit dengan memberikan obat cacing gratis untuk pedet umur 1 sampai 6 bulan. (Blue Print NTB BSS)

Untuk mengevaluasi apakah suatu kebijakan memiliki implikasi kinerja yang baik, dapat digunakan beberapa pendekatan (Michael Howlet):

- a. Analisis Lintas Dampak : Untuk mendapatkan bukti manfaat yang diperoleh *target group/benefecaries* berupa *intended impact* dan bukti adanya dampak yang tidak diharapkan / *unintended impact*

- b. Analisis Survey Pemakai : Untuk mendapatkan bukti manfaat yang dirasakan secara langsung *target group*

## **2. Pergerakan Pendapatan**

Pergerakan pendapatan merupakan perubahan jumlah pendapatan setiap periode dari hasil penjualan yang dapat menunjukkan peningkatan atau sebaliknya. Dalam penelitian ini, pergerakan pendapatan menyangkut jumlah pendapatan peternak dari waktu ke waktu dari hasil penjualan ternaknya.

Menurut Sa'id (2008), salah satu masalah dalam rantai pemasaran dan pengembangan keunggulan kompetitif agribisnis di Indonesia adalah sistem rantai pemasaran yang belum efektif, kondisi pasokan dan permintaan yang belum berimbang, serta penanganan dan pengendalian alam yang buruk. Dalam penelitian ini akan ditelusuri sistem penanganan dan pengendalian pemasaran melalui program BSS oleh pemerintah provinsi NTB. Oleh karena itu dalam penelitian ini berusaha mendeskripsikan konstruksi fenomena alamiah aktifitas pemasaran sapi dalam rangka membangun struktur pemasaran yang lebih tepat sehingga mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi peternak.

## **3. Model Pemasaran**

Sistem pemasaran merupakan satu kesatuan urutan lembaga-lembaga pemasaran dengan tugasnya melakukan fungsi-fungsi pemasaran untuk memperlancar aliran produk dari produsen awal ke tangan konsumen akhir. Begitu pula sebaliknya memperlancar aliran uang, nilai produk yang tercipta oleh kegiatan produktif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran, baik dari tangan konsumen akhir ke tangan produsen awal dalam suatu sistem komoditas (Gumbira dan Harizt, 2001).

Model pemasaran menunjukkan hubungan di antara berbagai aktivitas dalam kegiatan pemasaran yang melibatkan pelaku dan sistem pemasaran. Pengembangan model pemasaran memiliki karakteristik sebagai berikut (Adhinugroho, 2002):

1. Secara khusus berkaitan dengan penentuan cara bagaimana perusahaan mampu unggul dalam persaingan, dengan memanfaatkan kekuatannya untuk memberi nilai lebih kepada pelanggannya dari waktu ke waktu.
2. Merupakan suatu proses yang kompleks dimana biasanya melibatkan pengambilan keputusan yang kompleks pula oleh para manajer dan memerlukan analisis yang komprehensif tentang perubahan lingkungan maupun suatu perpaduan dari informasi yang bermanfaat.

3. Memerlukan banyak informasi strategik yang relevan dan juga pengetahuan yang luas.
4. Melibatkan ketidakpastian dan kerancuan yang tinggi.
5. Melibatkan pengalaman, intuisi dan dugaan dari para manajer.

#### 4. Penelitian Terdahulu

Untuk menambah pemahaman terkait permasalahan yang akan diteliti, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan pembandingan sebagai berikut:

**Damayanti**, melakukan penelitian dengan judul “Sistem Usaha Ternak Sapi Potong Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Keluarga”. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan sistem pemeliharaan ternak sapi potong di daerah penelitian, untuk mengetahui besar pendapatan usaha ternak sapi potong di daerah penelitian, untuk mengetahui besar kontribusi usaha ternak sapi potong terhadap pendapatan keluarga. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah 22 orang peternak. Hasil penelitian ini adalah : Sistem pemeliharaan usaha ternak sapi potong di daerah penelitian masih tergolong sederhana atau tradisional (ekstensif), rataan pendapatan bersih usaha ternak sapi potong adalah Rp. 22.573.523 per peternak/tahun, kontribusi pendapatan dari usaha ternak sapi potong terhadap pendapatan keluarga adalah lebih besar dari 30% yakni sebesar 69,3%.

**Priyono**, melakukan penelitian dengan judul Penguatan Modal Sosial Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Peternak Sapi Potong di Kabupaten Banjarnegara. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui tingkat modal sosial peternak sapi potong yang terdiri dari hubungan kekerabatan, norma, tingkah laku dan interaksi, (2) Mengetahui tingkat pendapatan usaha ternak sapi potong, (3) Menganalisis keterkaitan antara modal sosial dengan pendapatan dan efisiensi ekonomi usaha ternak sapi potong di Kabupaten Banjarnegara. Metode penelitian yang digunakan adalah survey. Responden diambil sebanyak 69 orang dengan pengambilan sampel secara acak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat modal sosial peternak sapi potong di Kabupaten Banjarnegara tergolong sedang.

**Adianto**, melakukan penelitian dengan judul Keberhasilan Implementasi Kebijakan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis keberhasilan implementasi program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian bahwa standart dan tujuan

kebijakan yang diimplementasikan dalam program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik.

### **C. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deduktif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode Deskriptif Eksploratif.

Adapun yang menjadi fokus pada penelitian kualitatif ini adalah menganalisis berbagai fenomena ditinjau dari aspek ekonomi berupa sistem pemasaran ternak yang dapat berpengaruh langsung bagi pergerakan pendapatan peternak sehubungan dengan kecilnya kuota penjualan keluar daerah yang diatur program BSS.

#### **2. Jenis dan Sumber Data**

Adapun dalam penelitian ini jenis data berupa informasi, keterangan diperoleh dari hasil wawancara dengan para peternak sapi baik yang mendapat bantuan dari program BSS maupun peternak yang tidak mendapat bantuan, Pemerintah Kabupaten, Kepala Dinas Peternakan, dan instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan program BSS.

Data tertulis berupa arsip, data statistik dan dokumen resmi, dalam hal ini dapat berupa dokumen jumlah dana bantuan untuk pelaksanaan program BSS, dokumen perkembangan jumlah ternak dan jumlah penjualan ternak, dokumen sistem dan prosedur pelaksanaan program BSS.

#### **3. Tahap-tahap Penelitian**

##### **a. Tahap Pra Lapangan**

Dalam rangka mengenal lingkungan penelitian, pada tahap pra lapangan dilakukan penjajakan pendahuluan untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi lapangan. Dari informasi yang diperoleh ditentukan informan yang akan dijadikan nara sumber. Dalam hal ini informan adalah ketua kelompok peternak yang terdiri dari 12 kelompok yang mendapat bantuan dan 8 kelompok yang tidak mendapat bantuan dari program BSS sehingga informan berjumlah 20 informan, selanjutnya informan akan bersifat *snowball*.

##### **b. Tahap Pekerjaan Lapangan**

Pada tahap ini dilakukan pencatatan dan mendokumentasikan segala hasil pengamatan dan hasil wawancara dengan para informan. *Indepth interview* dilakukan

dengan : Semua ketua kelompok peternak yang mendapat bantuan dari program BSS maupun yang tidak; Kepala Dinas Peternakan selaku pelaksana program BSS di lapangan

### **c. Tahap Analisis Data**

Beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain.

Pada tahap ini peneliti memilah dan mensintesis data yang telah diperoleh baik data hasil pengamatan, data hasil wawancara, data berupa dokumentasi baik resmi maupun tidak resmi. Selanjutnya data dan informasi tersebut dianalisa dengan tabulasi sederhana serta diuraikan secara deskriptif sehingga memberikan gambaran lengkap tentang kebijakan program BSS, kondisi pergerakan ekonomi peternak, serta persepsi masyarakat peternak tentang penerapan program BSS.

### **d. Teknik Penelitian**

Teknik yang digunakan adalah peneliti sebagai instrumen, pengamatan berperan serta, wawancara, dan penggunaan dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrumen utama melakukan wawancara, pengamatan dan melakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang diperoleh dari dua kelompok sumber informasi yaitu para peternak, pemerintah provinsi dan instansi terkait.

Teknik penelitian ini diarahkan untuk pengumpulan data sesuai unit analisis yaitu pergerakan/perubahan kondisi ekonomi peternak mengarah kepada komponen jumlah ternak, model pemasaran ternak dan pergerakan pendapatan peternak dari waktu ke waktu setelah program BSS.

## **4. Pengumpulan dan Pencatatan Data**

Pengumpulan data dilakukan secara terus menerus hingga dirasakan jenuh. Untuk itu maka peneliti dapat menempuh perpanjangan keikutsertaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu (1) interview mendalam (*in-depth interview*) terhadap informan dibantu dengan daftar pertanyaan (*questionnaire*); (2) pengumpulan data sekunder dari penelitian terdahulu serta data dan laporan dari lembaga penelitian dan instansi terkait dengan substansi penelitian.

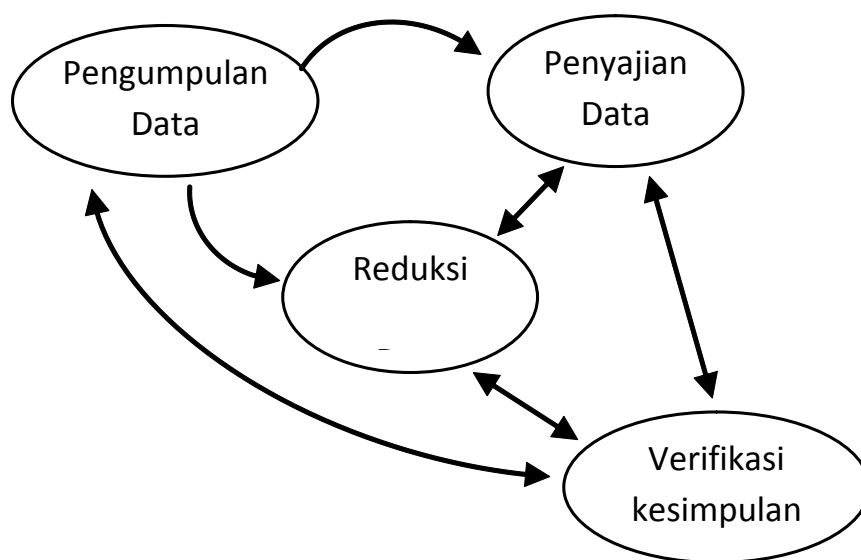


## 5. Analisis dan Penafsiran Data

Model analisis data yang digunakan adalah analisis model *Miles* dan *Huberman*, dimana data yang telah dikategorisasi, dan ditafsirkan selanjutnya dideskripsikan dalam suatu model. Untuk menyajikan data hasil penelitian agar lebih bermakna dan lebih mudah dipahami, maka digunakan *interactive model analysis* dari *Milles* dan *Huberman* (2009: 20) sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1

Model Analisis Milles dan Huberman



Sumber : Milles dan Huberman, 2009 : 20

Model di atas menunjukkan bahwa adanya interaksi yang berulang dan terus menerus. Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan merupakan rangkaian kegiatan analisis. Kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan kegiatan yang saling susul menyusul selama proses penelitian.

## D. Hasil Dan Pembahasan

### 1. Model Pemasaran Ternak Sapi di NTB Pasca Program BSS

Pemasaran pada prinsipnya merupakan proses kegiatan penyaluran produk yang dihasilkan oleh produsen agar dapat sampai kepada konsumen. Pasca program NTB BSS pemerintah mengupayakan untuk lebih memperluas pemasaran ternak bukan hanya menjual sapi hidup berupa bibit, akan tetapi mengupayakan penjualan produk berbahan daging sapi yang telah diolah menjadi berbagai makanan seperti



kerupuk kulit, dendeng paru, kerupuk urat dan abon sapi. Pengolahan hasil ternak masih bergerak di sektor makanan, belum kepada sektor industri pakaian atau kimia.

Model pemasaran ternak sesudah program BSS lebih memperhatikan kriteria jenis, umur, jenis kelamin dan waktu penjualan ternak diatur oleh pemerintah. Melalui peraturan Gubernur NTB ditentukan tata laksana pemasaran ternak dengan tujuan agar petani peternak dapat dengan mudah memasarkan ternaknya, namun di sisi lain, diperlukan pengendalian penjualan dan pemotongan ternak agar populasi ternak terus bertambah sehingga NTB dapat menjadi sumber penyedia daging maupun bibit ternak sapi nasional.

Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTB menjelaskan bahwa, pola penjualan dan pemotongan ternak diatur meliputi beberapa hal sebagai berikut (wawancara, 12 Agustus 2014) :

1. Tempat penjualan; penjualan ternak dapat dilakukan secara bebas antar peternak, peternak dan masyarakat lokal, penjualan di pasar ternak di sekitar Pulau Lombok bagi peternak di Lombok atau di sekitar Pulau Sumbawa bagi peternak di pulau Sumbawa.
2. Penentuan harga oleh pemerintah; harga jual sapi ditentukan sesuai dengan gradenya yang diatur secara periodik sesuai dengan perkembangan harga di pasar. Dengan demikian potensi kerugian peternak akibat kemungkinan penurunan harga ternak dapat dihindari.
3. Pembelian oleh pemerintah; selama program BSS, pemerintah banyak melakukan pembelian terhadap ternak sapi milik peternak untuk disalurkan kepada kelompok peternak lainnya sebagai bantuan. Dengan banyaknya pembelian oleh pemerintah maka harga ternak sapi menjadi relatif stabil, sehingga penurunan penjualan ke luar daerah akibat pembatasan kuota penjualan dapat diimbangi.
4. Waktu penjualan; bantuan ternak yang diberikan kepada kelompok peternak, tidak dibenarkan untuk dijual sebelum beranak minimal dua kali.
5. Regulasi pemotongan ternak; tidak mengizinkan pemotongan ternak bunting bantuan pemerintah. Bagi peternak yang tidak mendapat bantuan dan terpaksa memotong ternak yang bunting karena desakan ekonomi, maka pemerintah akan melakukan pembelian untuk diberikan kepada kelompok peternak lainnya untuk dipelihara.
6. Regulasi terhadap rumah potong hewan (RPH); RPH baik milik pemerintah maupun swasta dihimbau untuk menghindari pemotongan ternak bunting. Semua RPH harus memberikan laporan kepada Dinas Peternakan jika terdapat

ternak bunting di RPH sehingga Dinas Peternakan dapat memberikan solusi berupa pembelian oleh pemerintah atau pemberian insentif kepada pemilik ternak untuk menghindari pemotongan ternak bunting (Wawancara 12 Agustus 2014).

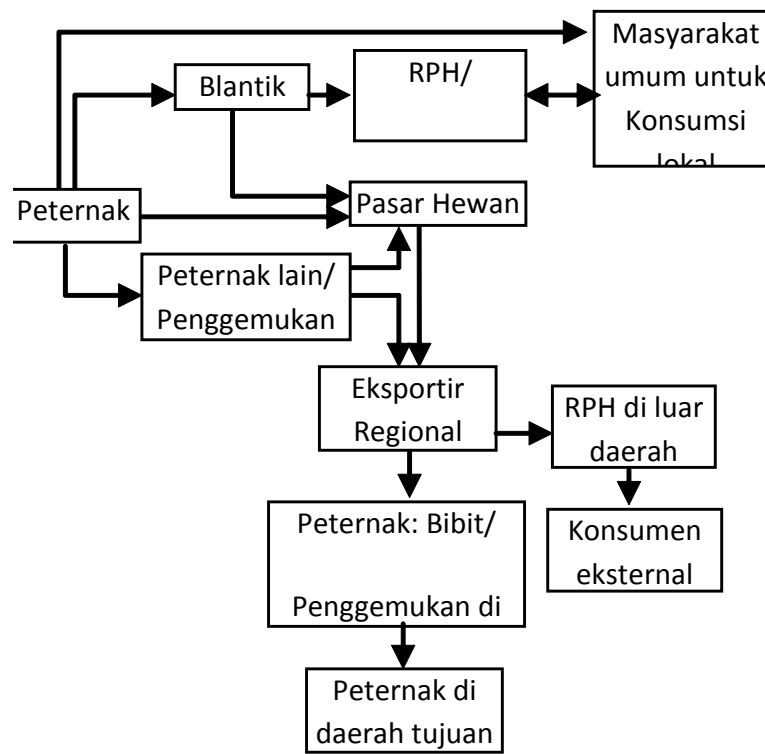
Selama pelaksanaan program NTB BSS, jumlah pembelian ternak oleh pemerintah yang cukup banyak untuk dihibahkan kepada para kelompok peternak. Hal ini menjadi katalisator untuk menstabilkan harga ternak, dapat membawa dua dampak yaitu a) semakin banyaknya ternak di daerah NTB karena pembelian ternak disalurkan kepada peternak lainnya sehingga ternak tidak harus ke luar daerah; b) harga jual ternak lokal relatif stabil karena iklim pasar ternak menjadi semakin ramai oleh pembelian pemerintah, sehingga pendapatan petani ternak menjadi lebih stabil pula.

Indikator yang menunjukkan pendapatan /harga ternak sapi relatif stabil adalah Nilai Tukar Petani Ternak (NTPT) di Provinsi NTB sejak periode 2009 – 2013 selalu berada di atas 100. Pada tahun 2009 NTPT sebesar 106,87 dengan tahun dasar 2007. Hal ini berarti bahwa kemampuan daya tukar petani ternak naik 6,87 persen dibanding tahun dasar 2007. Sampai tahun 2013 nilai tukar petani ternak tetap berada di atas 100, misalnya pada Januari 2014 NTPT sebesar 107,89 (BPS NTB, Januari 2014).

Adapun model pemasaran ternak setelah program NTB BSS diatur hanya pada syarat penjualan/pemotongan, terutama ternak betina yaitu pembatasan pemotongan betina bunting; pembatasan kuota pengiriman ternak ke luar daerah; dan penjualan ternak bantuan boleh dilakukan setelah ternak minimal telah beranak dua kali.

Gambar 2.

Model Pemasaran Ternak Sapi di NTB setelah Program Bumi Sejuta Sapi



Sumber: Yusuf dan Nulik (dikembangkan oleh penulis untuk penelitian ini).

Dalam hal pengiriman ternak ke luar daerah, Program NTB BSS memberikan ijin dengan kebijakan selektif berupa :

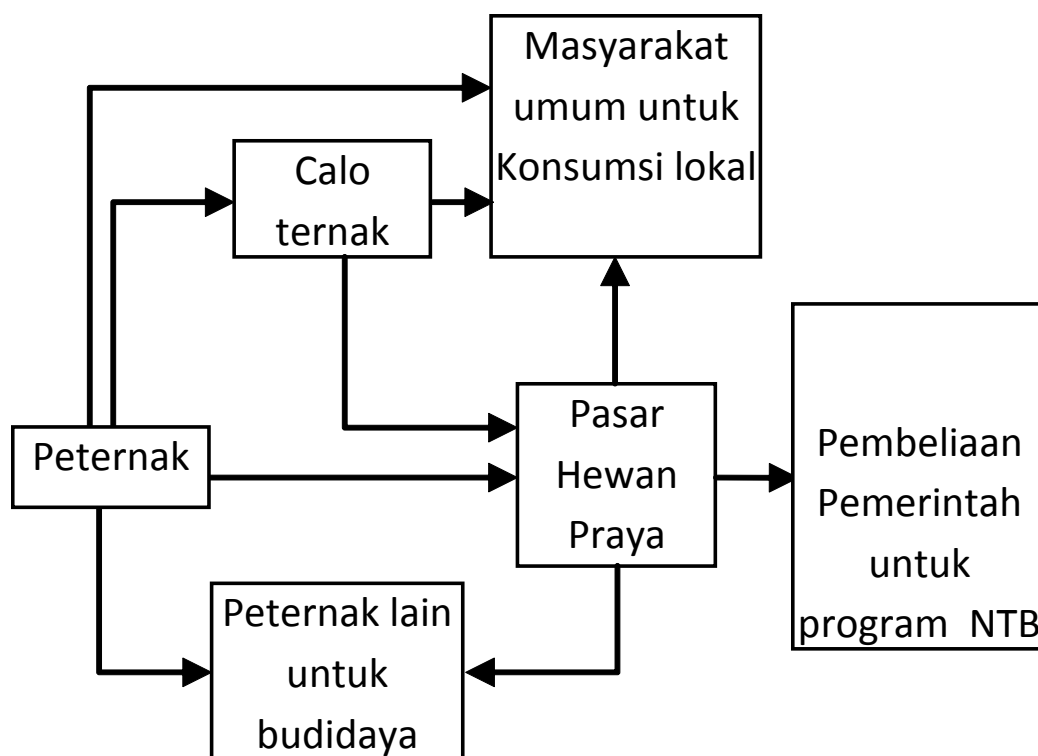
1. Pengiriman ke RPH luar daerah dilakukan dengan kuota terbatas yaitu target terus dikurangi setiap tahun hingga hanya 5% di tahun 2018.
2. Untuk kebutuhan konsumsi daging luar daerah, ternak yang boleh dikirim ke luar daerah hanya ternak jantan (dengan mempertimbangkan kecukupan pejantan di daerah NTB), atau ternak betina yang sudah tidak produktif.
3. Pengeluran ternak produktif atau ternak bakalan ke luar daerah sebagai bibit atau untuk penggemukan, dapat dilakukan atas permintaan khusus oleh pemerintah daerah tujuan.

## 2. Model Pemasaran Ternak Sapi di Kecamatan Praya Timur Setelah BSS

Kecamatan Praya Timur merupakan daerah penghasil ternak yang cukup potensial karena memiliki lahan kurang produktif yang cukup sebagai tempat penggembalaan. Kemampuan para peternak untuk mengelola ternak sebagai sebuah

bisnis masih tergolong sederhana. Hal ini dapat dilihat dari perilaku para peternak yang bersifat monoton turun temurun sebagai pembudidaya ternak kemudian menjual ternak hidup pada sesama peternak, calo ternak, pedagang pengumpul, atau paling jauh sampai di pasar ternak di Praya Lombok Tengah. Demikian pula produk olahan berbahan daging sapi hingga saat ini belum ditemui.

Gambar 3.  
Model Pemasaran Ternak Sapi di  
Kecamatan Praya Timur



Sumber : Yusuf dan J. Nulik (dikembangkan oleh penulis untuk penelitian ini).

### 3. Dampak Ekonomi/Pergerakan Pendapatan Peternak Sapi di Kecamatan Praya Timur Setelah Program BSS.

Secara umum pendapatan petani peternak di NTB selama digulirkan program NTB BSS pada kondisi yang meningkat. Hal ini dapat dilihat dari Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi NTB dalam kondisi cukup kuat. Pergerakan NTP mengidentifikasi pergerakan tingkat kesejahteraan petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan

jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

NTP Provinsi NTB menurut Sub Sektor Bulan Oktober 2013 diketahui bahwa subsektor peternakan memiliki Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPPT) paling tinggi yaitu 118,23 diikuti oleh Nilai Tukar Petani Nelayan (NTN) 95,38, Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 92,23, Nilai Tukar Petani Padi & Palawija (NTPP) 88,39, dan yang terendah adalah nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 87,29. Dari data tersebut diketahui bahwa nilai tukar petani ternak dalam kondisi paling kuat yaitu sebesar 118,23. Berikut dipaparkan data nilai tukar petani peternak Provinsi NTB tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Rata-rata NTP dan NTPPT Provinsi NTB Tahun 2014 dengan tahun dasar 2012=100

Bulan	Rata-rata nilai tukar petani (NTP)	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPPT)
Jan	99.75	107.90
Feb	99.67	108.07
Mar	100.03	108.19
Apr	99.33	108.76
Mei	98.96	108.14
Jun	99.59	108.71
Jul	100.13	109.82
Agst	99.72	109.17
Sept	99.56	109.35
Okt	100.80	110.76
Rt-rt	99.75	108.89

Sumber : BPS Provinsi NTB, Tahun 2014

Dari data tersebut di atas, diketahui bahwa nilai tukar petani secara umum berada di bawah 100 jika dibanding dengan nilai tukar petani tahun dasar yaitu tahun 2012. Hal ini berarti bahwa jika dilihat dari tahun dasar 2012, nilai tukar petani secara umum, menurun menjadi 99.75 artinya menurun sebesar 0.25%. Sementara di sisi lain nilai tukar petani peternak selalu berada di atas 100, artinya nilai tukar petani peternak dibanding dengan tahun 2012 terjadi kenaikan rata-rata sebesar 8.89%. Dari data tersebut secara umum dapat dikatakan bahwa pendapatan petani peternak mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8.89% sejak tahun 2012.

Untuk menganalisis dampak dari program NTB BSS maka dilakukan analisis lintas dampak. Analisis ini dimaksudkan untuk mendapatkan bukti manfaat yang diperoleh *target group/benefecaries* berupa *intended impact* dan bukti adanya dampak yang tidak diharapkan/*unintended impact*.

Untuk melihat apakah model pemasaran ternak yang diterapkan terhadap peternak sapi di Kecamatan Praya Timur, dapat membawa dampak yang menguntungkan atau mungkin sebaliknya, maka dilakukan dua pendekatan yaitu analisis lintas dampak; dan analisis survey.

### 1. Analisis Lintas Dampak

#### a. Intended Impact

Manfaat yang diharapkan dengan adanya program bumi sejuta sapi di NTB adalah:

- Meningkatkan jumlah populasi sapi di NTB bahkan mencapai dua juta ekor sapi. Hasil penelitian menunjukkan jumlah ternak sapi di kabupaten Lombok Tengah sejak 2008 – 2011 terus mengalami peningkatan dari 75.748 menjadi 107.220 ekor di tahun 2011. Demikian pula dengan para peternak di Kecamatan Praya Timur, jumlah ternak para peternak sebelum mendapat bantuan rata-rata dua ekor tiap anggota, sedangkan dengan bantuan pemerintah, maka rata-rata jumlah ternak tiap anggota kelompok mencapai antara 3 – 5 ekor.
- Meningkatkan kesejahteraan petani secara umum dan peternak sapi khususnya. Peningkatan jumlah ternak secara otomatis akan meningkatkan pendapatan peternak.

#### b. Unintended Impact

Selain dampak yang diharapkan, sebuah kebijakan sering diikuti oleh dampak yang kadang merugikan pihak lain. Dalam program BSS *unintended impact* terdiri dari:

- Kerugian yang dirasakan oleh Pedagang ternak antar pulau. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, pihak yang kurang diuntungkan dengan program NTB BSS ini adalah pedagang/pengusaha ternak antar pulau karena salah satu point dari program NTB BSS adalah membatasi pengiriman ternak terutama ternak betina ke luar daerah.
- Distribusi ternak di kalangan peternak kurang merata. Kebijakan NTB BSS mengharuskan dengan bantuan ternak terhadap salah satu kelompok peternak pada gilirannya akan menyebabkan adanya pemindahan hak atas ternak kepada kelompok lain. Dalam pelaksanaannya tujuan ini tidak dapat terlaksana karena

hingga saat ini belum ada suatu perjanjian antara pemerintah dan peternak, dan belum ada badan pengontrol untuk mengawasi proses pemindahan ternak.

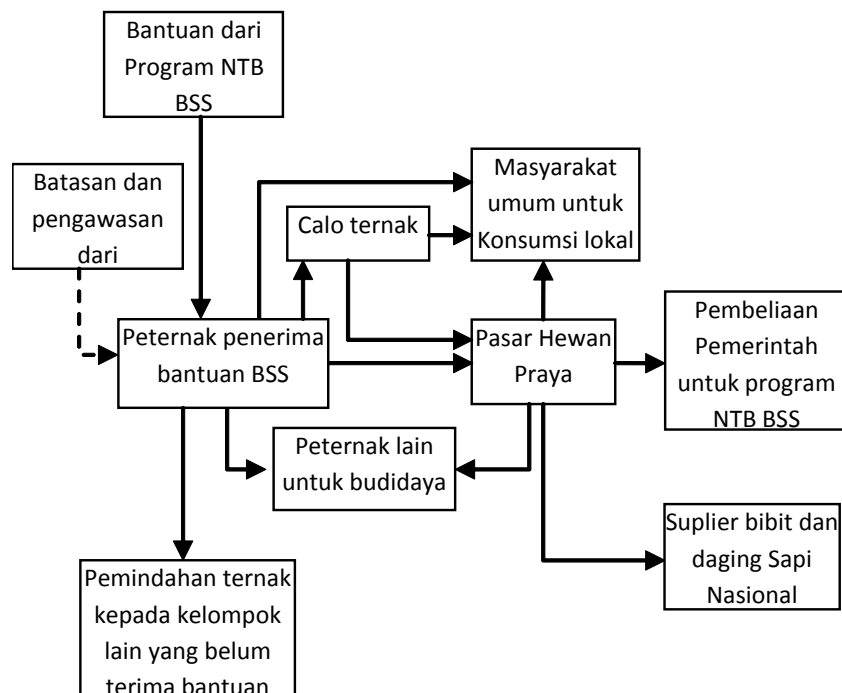
### c. Analisis Survey Pemakai

Analisis ini dimaksudkan apakah bukti manfaat yang diharapkan oleh kebijakan Program NTB BSS dirasakan manfaatnya oleh pemerintah maupun petani peternakan di Kecamatan Praya Timur. Bagi pemerintah, kebijakan NTB BSS tentu telah menjadikan NTB sebagai salah satu sumber sapi yang perlu diperhitungan di Indonesia.

Kelompok sasaran dari program NTB BSS adalah para peternak sapi yang telah memenuhi syarat. Di Kecamatan Praya Timur, jumlah kelompok peternak yang telah mendapat bantuan adalah sebanyak 12 kelompok. Bantuan ternak pemerintah telah dapat meningkatkan jumlah ternak terlihat sejak dimulainya program NTB BSS tahun 2008, populasi ternak telah mengalami peningkatan dari 75.748 ekor pada tahun 2008 menjadi 107.220 ekor di tahun 2011.

Dari berbagai kelebihan dan kekurangan dari program NTB BSS, penulis dapat menyusun model pemasaran ternak sebagai berikut :

Gambar 4.  
Model Modifikasi Pemasaran Ternak Sapi  
di Kecamatan Praya Timur Pasca BSS





Bantuan ternak dari pemerintah melalui program NTB BSS dapat dikelola dan miliki oleh kelompok peternak penerima bantuan. Namun demikian diperlukan sebuah sistem kontrol dari pemerintah berupa : a) pengawasan kelompok peternak agar tidak terjadi penjualan ternak sebelum ternak bantuan berkembang biak minimal dua keturunan; b) Pembuatan regulasi disertai pengawasan agar dalam jangka waktu tertentu terjadi transfer ternak dari penerima bantuan yang sudah berkembang kepada kelompok baru yang belum menerima bantuan; c) sistem seleksi yang lebih akurat terhadap kelompok penerima untuk mengurangi resiko kehilangan ternak karena keamanan yang kurang terjamin; d) diperlukan pembentukan pengusaha lokal di Kecamatan Praya Timur yang memiliki skope usaha lebih luas untuk memenuhi kebutuhan daging nasional.

#### **D. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

Model pemasaran ternak pasca diluncurkannya program BSS, peternak di Kecamatan Praya Timur masih mengguna-kan model pemasaran lama, penjualan dilakukan secara bebas di tingkat lokal.

1. Pasca NTB BSS, pemerintah memberikan batasan penjualan dan pemotongan ternak terutama ternak betina produktif dan ternak bunting. Untuk menghindari kesulitan ekonomi peternak, maka setiap pemotongan ternak bunting dicegah dengan memberikan insentif kepada pemilik ternak agar tidak memotong ternaknya.
2. Pengiriman ternak ke luar daerah dibatasi pada ternak jantan, ternak tidak produktif dan ternak bakalan dengan permintaan resmi dari pemerintah daerah tujuan.
3. Pergerakan pendapatan petani peternak di Kecamatan Praya Timur menunjukkan peningkatan, hal ini sesuai dengan perkembangan nilai tukar petani peternak yang nilainya selalu berada di atas 100, jumlah ternak bantuan pemerintah menyebabkan kepemilikan ternak menjadi semakin bertambah sehingga pendapatan juga bertambah.

## Referensi

- Adianto, 2005, Keberhasilan Implementasi Kebijakan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kota Pekanbaru
- Berita Resmi Statistik BPS Provinsi NTB, *Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Sub Sektor Bulan Oktober 2013*. No. 68/11/52/Th.VI, 1 Nopember 2013, Mataram 2013.
- BPS. 2005-2011. *NTB Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mataram, 2005
- BPS Kab. Lombok Tengah, 2013, *Kecamatan Praya Timur Dalam Angka*, 2013. Praya
- Damayanti, 2008, *Sistem Usaha Ternak Sapi Potong Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Keluarga (Studi Kasus : Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang)*
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2012, *Database Kelompok Tani Ternak NTB Tahun 2008 – 2012*, Mataram, 2012
- , *Road Map Pengembangan Industri Peternak NTB BSS 2012 – 2017*, Mataram, 2012
- , *Komoditas Unggulan Nusa Tenggara Barat: Sapi, Jagung, Rumput Laut (PIJAR)*, Mataram 2010
- Ghony, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Helena dan Prajogo, 2012, *Dinamika dan Kebijakan Pemasaran Produk Ternak Sapi Potong di Indonesia Timur*, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- Ilham dan Yusmi, 2004, *Sistem Transportasi Perdagangan Ternak Sapi dan Implikasi Kebijakan di Indonesia Timur*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Milles, MB & Hubberman, AM (2009), *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan Mulyarto, UI Percetakan, Jakarta.
- Moleong, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Pemda Provinsi NTB, 2009, *Blue Print NTB Bumi Sejuta Sapi*

Priyono, 2008, *Penguatan Modal Sosial Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Peternak Sapi Potong Di Kabupaten Banjarnegara*.

Tim PSEKP-ACIAR, 2009, *Preferensi Konsumen Daging Sapi di Wilayah Jabodetabek, NTB, NTT, dan Sulawesi Selatan*. Laporan Hasil Survey Lapangan. Kerjasama Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dengan ACIAR.

Yusuf dan J. Nulik, *Kelembagaan Pemasaran Ternak Sapi Potong di Timor Barat, Nusa Tenggara Timur*, Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Vol. 11, No.2, Juli 2008

[www.ntbterkini.com](http://www.ntbterkini.com)